

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara multikultural yang terdiri dari beragam kultur masyarakat yang berbeda seperti suku, agama, ras, etnis, wilayah tempat tinggal, warna kulit, adat istiadat dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari kekayaan sosiokultural dan kondisi geografis yang luas dan beragam di wilayah Indonesia. Masyarakat menjadi beragam karena orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia kerap datang dan menetap di suatu tempat lalu membawa adat istiadat mereka ke tempat tinggal yang baru. Keadaan tersebut memunculkan adanya perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk.

Upaya untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada itu, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengikat masyarakatnya menjadi satu kesatuan (majemuk). Salah satu caranya adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Sada (2011:6) nilai-nilai kemanusiaan (*Human values*) mempunyai kata manusia yang berarti bahwa nilai-nilai ini adalah unik untuk umat manusia dan bukan untuk binatang, dan nilai-nilai kemanusiaan haruslah universal yang artinya tidak tergantung pada ras, kelompok, tradisi dan kebudayaan. *Institute of Sathya Sai Education* (Clarry Sada, 2011) mengemukakan lima macam nilai-nilai

kemanusiaan yaitu : (1) Nilai Kebenaran, (2) Nilai Kedamaian, (3) Nilai Cinta Kasih, (4) Nilai Kebajikan, (5) Nilai Tanpa Kekerasan.

Berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa kasus kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tindakan kekerasan ini menjadi salah satu perbuatan yang bertentangan atau menyimpang dengan nilai Kemanusiaan, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dikarenakan dalam sila tersebut mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kasus kekerasan dalam dunia pendidikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir akan dijabarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 Diagram Kasus Kekerasan Oleh Anak di Institusi Pendidikan



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan kasus kekerasan oleh anak mengalami peningkatan. Kekerasan fisik yang terjadi di sepanjang tahun 2017 didominasi penganiayaan, pengroyokan dan perkelahian. Pada tahun 2018

kasus yang cukup mengesankan adalah tawuran pelajar. Sedangkan pada tahun 2019 kekerasan yang dilakukan oleh siswa umumnya dilakukan secara bersama-sama atau dikeroyok kemudian dipukul, ditampar lalu ditendang. Masih banyaknya kasus kekerasan oleh anak di Indonesia memperlihatkan bahwa generasi bangsa belum seluruhnya dapat menunjukkan jati diri bangsa yang telah termuat dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila adalah suatu *Philosofische grondslag*, suatu *Weltanschauung* yang diusulkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar bagi negara Indonesia yang kemudian merdeka. Pancasila dikualifikasikan sebagai falsafah dan ideologi yang menunjukkan jati diri atau cita visioner bangsa Indonesia. Jadi untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila penting untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat Indonesia sebab Pancasila sebagai ideologi negara merupakan wujud penjelmaan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia secara universal.

Sifat dasar filsafat Pancasila bersumber pada hakikat kodrat manusia karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini karena seorang manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak lepas dari manusia lain. Sehingga sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tersebut mampu memberikan dasar kepada kita sebagai manusia agar senantiasa

memanusiakan orang lain dengan selayaknya dalam kehidupan. Selain itu, di dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia, serta menolak segala bentuk kejahatan terhadap manusia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua Pancasila secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu di dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Persoalan hak-hak asasi manusia menjadi tantangan yang serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia. Komitmen tidak terbatas pada pemuliaan hak sipil dan hak politik melainkan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Proses pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah yang saat ini sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan pergaulan di Sekolah. Terlebih pada kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Dampak arus globalisasi dalam segala aspeknya serta kemajuan teknologi yang semakin pesat mendukung terjadinya pergeseran nilai-nilai Pancasila. Banyaknya generasi muda yang kurang memperdulikan akan nilai-nilai Pancasila, khususnya

para pelajar saat ini yang pada hakikatnya mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Masih sering terjadinya kasus tawuran antar pelajar yang terkadang sampai menelan korban jiwa yang awal mulanya hanya disebabkan karena masalah kesalahpahaman dan kurangnya sikap menghargai dari segala bentuk perbedaan. Keadaan semacam ini membutuhkan perhatian banyak pihak untuk semakin meningkatkan kualitas pelajar melalui pendidikannya.

Pendidikan menjadi hal yang harus diperhatikan secara lebih karena menyangkut masa depan bangsa melalui generasi penerusnya yang dilaksanakan lewat pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. Tujuan pendidikan yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia. Seperti yang termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas fungsi sekolah dapat dikatakan adalah sebagai sarana untuk meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri didalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Sarana yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi sekolah yaitu melalui pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan aspek yang terintegrasi dari proses pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar (Djamarah, 2010:39). Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya terdapat perbedaan, seperti perbedaan daya tangkap peserta didik dalam menerima pelajaran. Adanya perbedaan ini menjadikan guru harus mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu hakikat pembelajaran adalah lebih kepada pengaturan.

Pembelajaran sebagai suatu proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik. Sekaligus sebagai sarana untuk dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan (Sain Hanafy, 2014:74). Interaksi ini berakar dari pihak pendidik (guru) dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik. Berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Secara garis besar tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memiliki pengetahuan dan cerdas dalam berperilaku. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban misi dalam pembentukan karakter warga negara yang baik. Seperti yang dikemukakan Winataputra (Astuti 2017: 536) bahwa:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional PPKn pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter.

Berdasarkan uraian diatas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Sebagaimana menurut pandangan Cogan (1999:4) yang mengartikan PKn atau *civic education* sebagai "*The foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*". Maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sebagai ajang dalam mempersiapkan warganegara muda yang aktif, para pemikir bangsa ini telah membuat pedoman untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang diatur dalam ketetapan TAP MPR No 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Butir nilai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tersebut terdiri atas: (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabanya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; (3) Saling mencintai sesama manusia; (4) Mengembangkan sikap tenggang rasa; (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; (6) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (8) Berani membela keadilan dan kebenaran; (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; dan (10) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK (Ibu Suharti) dan guru PPKn (Ibu Marsha Ayudya) yang telah dilakukan pada tanggal 6 November 2019, diperoleh data bahwa pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh peserta didik di SMP N 5 Purbalingga. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya kasus yang masuk pada Bimbingan Konseling (BK) perihal perilaku peserta didik yang seringkali melakukan diskriminasi dan perbuatan tidak

menyenangkan kepada teman-temannya, baik itu dilakukan secara verbal seperti julukan buruk, celaan dan hinaan ataupun secara fisik seperti pemalakan, pemukulan, pengroyokan, bahkan menghancurkan barang-barang milik si korban.

Dilihat dari data buku kasus siswa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017, 2018, 2019) terdapat 30 kasus penyimpangan sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang pernah terjadi di SMP Negeri 5 Purbalingga. Mayoritas siswa yang terlibat adalah siswa kelas VIII yaitu sebanyak 14 kasus, siswa kelas VII sebanyak 9 kasus dan siswa kelas IX sebanyak 7 kasus. Perilaku seperti ini seringkali dilakukan oleh siswa bersama dengan kelompok bermainnya atau *genk* kepada siswa yang biasanya mempunyai postur tubuh lebih kecil dan memiliki karakteristik sifat pendiam. Bahkan tak jarang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan yang dianggapnya adalah kaum lemah. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat beberapa peserta didik di SMP negeri 5 Purbalingga yang belum dapat memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam butir Pancasila khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Munculnya kasus demikian salah satunya disebabkan karena pemahaman peserta didik yang masih kurang dalam menerima perbedaan serta bersedia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Bahkan saat sedang mengikuti pembelajaran pun banyak guru yang mengeluhkan sikap peserta didik yang terkadang kurang

menghargai guru baik itu ditunjukkan dengan perkataan ataupun perilaku. Misalkan, dengan asyik mengobrol bersama teman dan mengabaikan guru yang sedang menjelaskan materi.

Usaha untuk mencegah permasalahan ini memang bukanlah menjadi tugas BK saja, akan tetapi seluruh pihak sekolah memiliki peran. Salah satunya adalah guru PPKn yaitu melalui pembelajaran PPKn yang memiliki peran khusus untuk membangun karakter peserta didik yang baik dalam usaha mencegah perilaku yang melanggar sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang terjadi di SMP N 5 Purbalingga. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab pada peserta didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: “Adakah Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Pada Peserta Didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat mengetahui Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab Pada Peserta Didik kelas VIII di SMP N 5 Purbalingga Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Aspek teoretis

Pada tataran teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- 1) Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pembelajaran PPKn , baik yang berkaitan dengan aspek persiapan pembelajaran, pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran. Begitupun dengan pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab pada peserta didik.
- 2) Menambah referensi mengenai Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, khususnya bagi Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Aspek praktis

Pada tatanan praktis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi:

1) Sekolah

Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi dunia pendidikan akan arti pentingnya lingkungan sekolah sebagai salah satu sarana dalam membina sikap dan perilaku peserta didik.

2) Guru

Penelitian ini menjadi masukan bagi pendidik dalam membina sikap dan perilaku peserta didik khususnya melalui pembelajaran.

3) Peserta Didik

Penelitian ini membangkitkan kesadaran akan arti penting pembelajaran PPKn khususnya nilai dalam Pancasila Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam bersikap dan berperilaku.

4) Peneliti

Hasil penelitian ini sangat membantu untuk memberikan masukan atau menambah pengetahuan peneliti mengenai Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

